

# LAPORAN HASIL SURVEI ORIENTASI BISNIS PERBANKAN OJK (SBPO)

## TRIWULAN II - 2024

Dalam pelaksanaan *surveillance* perbankan, dibutuhkan informasi lebih mendalam, baik kuantitatif dan kualitatif, untuk melihat sinyal awal perubahan prospek/orientasi kegiatan bisnis bank. Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) dilaksanakan kepada Bank Umum pertama kali pada Triwulan III-2019 setiap triwulan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah/tendensi bisnis perbankan pada triwulan mendatang. SBPO menghasilkan suatu Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP), yaitu indeks komposit yang menunjukkan persepsi dengan rentang nilai 1 s.d 100, di mana indeks >50 menunjukkan persepsi optimis, indeks =50 menunjukkan persepsi stabil, dan indeks <50 menunjukkan persepsi pesimis. IBP terdiri dari tiga subindeks yaitu Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR) dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK).

Selain IBP, SBPO juga menghasilkan proyeksi beberapa indikator baik makroekonomi maupun Perbankan. Berdasarkan perbandingan antara hasil survei dan realisasi secara historis terlihat bahwa SBPO cukup dapat memprediksi arah dari beberapa indikator baik makroekonomi maupun perbankan di Indonesia.



## Hasil SBPO TW II - 2024 Menunjukkan Persepsi yang Optimis

Secara keseluruhan, hasil SBPO triwulan II-2024 menunjukkan persepsi yang makin optimis. Hal ini tecermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan II-2024 yang berada pada zona optimis di level 58, meningkat dari level 56 pada triwulan I-2024. Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi terhadap peningkatan intermediasi dan keyakinan bahwa bank cukup mampu mengelola risiko di tengah tantangan kondisi makroekonomi global yang kurang kondusif

### Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)

#### Triwulan II-2024

| KETERANGAN                                   | Q2'23     | Q1'24     | Q2'24     |
|--|-----------|-----------|-----------|
| INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM) | 60        | 47        | 31        |
| INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)                 | 61        | 53        | 59        |
| INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)              | 84        | 68        | 83        |
| <b>INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)</b>    | <b>68</b> | <b>56</b> | <b>58</b> |

Sumber: SBPO TW II 2024, diolah

IBP TW II -  
2024  
**58**

Jumlah responden SBPO TW II - 2024



Porsi Aset responden dari total aset Bank Umum Indonesia



## Komponen Pembentuk IBP

### A. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan II-2024 berada pada level pesimis dengan indeks yang menurun menjadi 31 dari 47 pada triwulan I-2024. Pesimisme pada triwulan II-2024 disebabkan oleh prediksi bahwa BI Rate akan meningkat kemudian nilai tukar Rupiah terhadap USD akan melemah dan inflasi diperkirakan meningkat. Namun demikian, di tengah perkiraan kondisi makroekonomi tersebut, PDB diperkirakan tumbuh meningkat dari realisasi triwulan I-2024 sebesar 5,11% (yoy). Pertumbuhan PDB didorong oleh konsumsi masyarakat yang diperkirakan meningkat pasca Bulan Ramadhan, adanya perayaan Hari Raya Idul Fitri dan adanya banyak hari libur pada triwulan II-2024. Selain itu, Investasi juga diperkirakan membaik pasca Pemilu yang lebih singkat atau hanya satu putaran saja.

Sedangkan suku bunga acuan BI rate diperkirakan meningkat sebesar 25 bps seiring dengan upaya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain

itu, inflasi AS yang saat ini masih tinggi menyebabkan The Fed masih menahan FFR. Sejalan dengan proyeksi tersebut, per April 2024 suku bunga acuan BI rate telah naik 25 bps menjadi sebesar 6,25% dan per Mei 2024 suku bunga The Fed dipertahankan pada level 5,25%-5,50%.

Inflasi pada triwulan II-2024 diperkirakan meningkat yang didorong oleh peningkatan harga pangan sebagai dampak dari El Nino, naiknya permintaan akibat tingginya minat belanja masyarakat pasca Hari Raya Idul Fitri, meningkatnya harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang masih terjadi dan naiknya *imported inflation* akibat melemahnya nilai tukar

Selanjutnya, nilai tukar Rupiah terhadap USD diperkirakan melemah dari Rp15.853/USD (kurs tengah 28 Maret 2024) seiring dengan ketidakpastian ekonomi global, adanya eskalasi tensi konflik geopolitik di Timur Tengah dan ketidakpastian *timing* pemangkasan suku bunga The Fed.

# IKM

diwakili ekspektasi responden terhadap PDB, BI7DRR, laju Inflasi, dan kurs IDR/USD

## B. Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan II-2024 masih terjaga dan terkendali. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 59 yang berada di zona optimis, meningkat dari 53 pada triwulan sebelumnya. Seiring dengan kondisi kegiatan usaha yang membaik dan pelaksanaan hapus buku untuk menekan peningkatan NPL, responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF gross) pada triwulan II-2024 akan membaik dari 2,25% pada posisi Maret 2024. Namun demikian, masih terdapat potensi peningkatan NPL yang berasal dari pemburukan kredit restru Kol 1 dan Kol 2, seiring dengan telah berakhirnya kebijakan restrukturisasi yang dapat menjadi salah satu faktor pendorong pemburukan.

Selanjutnya, risiko pasar diperkirakan cukup terjaga antara lain karena perbankan menjaga PDN pada level rendah dan berada pada posisi long serta NIM yang diproyeksikan meningkat. Berdasarkan data aktual, rasio PDN per Maret 2024 sebesar 1,66% atau masih pada level rendah, jauh di bawah threshold 20%. Selanjutnya, NIM diperkirakan meningkat seiring meningkatnya suku bunga acuan dan peningkatan penyaluran kredit. Berdasarkan hasil survei, NIM diproyeksi lebih tinggi dibandingkan realisasi NIM per Maret 2024 sebesar 4,59%.

Risiko likuiditas diperkirakan masih terjaga dan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong ekspektasi "alat likuid (kas dan setara kas)" perbankan yang masih akan tumbuh. Sejalan dengan hal tersebut, hingga Maret 2024 rasio AL/NCD masih jauh di atas threshold 50% yaitu sebesar 121,05%

### IPR

diwakili persepsi/ekspektasi responden terhadap  
NPL/NPF, NIM, PDN, dan *net cash-flow*

## C. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan II-2024 masih optimis dengan IEK sebesar 83, meningkat dari 68 pada triwulan I-2024. Optimisme kinerja perbankan didorong oleh ekspektasi peningkatan DPK dan penyaluran kredit yang berdampak pada peningkatan laba dan modal perbankan.

Optimisme kenaikan pertumbuhan kredit didorong oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik pasca Pemilu 2024, adanya momentum hari Raya Idul Fitri dan banyak hari libur sepanjang April hingga Juni yang meningkatkan konsumsi masyarakat, serta masih terjaganya daya beli masyarakat. Berbagai hal tersebut disinyalir akan mendorong kenaikan permintaan kredit dan aktivitas usaha. Responden memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit hapus buku diperkirakan relatif stabil.

Selanjutnya, Undisbursed Loan diperkirakan menurun sejalan dengan proyeksi kenaikan kredit seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis debitur. Sedangkan untuk kredit restrukturisasi diperkirakan menurun seiring dengan membaiknya kinerja debitur. Dari sisi pertumbuhan kredit, kredit/pembiayaan diperkirakan masih akan tumbuh pada Juni 2024.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada triwulan II-2024, DPK juga akan tumbuh sejalan dengan kegiatan ekonomi yang semakin membaik, usaha bank memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit, dan adanya dana pemerintah yang masuk pada bank daerah. Kenaikan DPK diperkirakan akan lebih didorong terutama oleh deposito. Lebih lanjut, suku bunga DPK diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan I-2024 seiring dengan *BI-Rate* yang meningkat.

### IEK

diwakili persepsi/ekspektasi responden terhadap pertumbuhan kredit dan DPK, keuntungan, serta permodalan bank

# ANECDOTAL INFORMATION

Berdasarkan hasil survei pada triwulan II-2024, diperoleh informasi terkait beberapa isu sebagai berikut:

**a. Prospek Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)**

Mayoritas bank responden optimis bahwa prospek penyaluran KKB ke depan masih akan tumbuh meskipun sempat melambat pada awal tahun 2024 karena dipengaruhi oleh situasi politik yang belum menentu, sehingga membuat nasabah cenderung *wait and see* serta menahan diri untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor. Adapun hal yang mendasari keyakinan mayoritas bahwa prospek pertumbuhan KKB ke depan cukup tinggi antara lain dikarenakan potensi pasar otomotif di Indonesia yang masih sangat besar didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal tersebut diyakini akan mendorong terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat yang mana akan berdampak juga terhadap penjualan kendaraan bermotor.

Di sisi lain, terdapat sebagian bank yang memandang bahwa prospek pertumbuhan KKB ke depan masih berpotensi tertahan seiring terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD dan kenaikan suku bunga acuan yang dapat berdampak negatif terhadap melemahnya permintaan masyarakat terhadap KKB. Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perlambatan KKB adalah adanya pola pembelian customer yang semakin banyak membeli kendaraan secara *cash*.

Sejauh ini, permintaan masyarakat terpantau masih tetap tinggi baik terhadap kendaraan baru maupun bekas. Selain itu, animo masyarakat terhadap kendaraan listrik juga terindikasi meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring dengan pemberian insentif kebijakan Pemerintah yang semakin menambah daya tarik terutama dari sisi komersil guna mendorong pertumbuhan KKB di Indonesia. Pada bulan Maret 2024, volume penjualan kendaraan mobil dan motor masing-masing tumbuh 5,69% (mtm) dan 4,49% (mtm) meningkat dari 1,51% (mtm) dan -5,73% (mtm) pada bulan sebelumnya.

Kondisi pertumbuhan KKB pada mayoritas bank juga tetap terjaga walaupun dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan risiko eksternal yang cukup berat seperti ketidakpastian global, tekanan inflasi, maupun ketegangan politik. Per Maret 2024, KKB masih tumbuh 12,74% (yoy) meskipun melambat dari 15,43% (yoy) pada Maret 2023. Secara umum, beberapa strategi bank dalam menghadapi isu perlambatan KKB antara lain:

- 1) Membangun mitra strategis pada bisnis retail (*channelling*);
- 2) Sinergi dengan perusahaan pembiayaan melalui skema *Joint Finance*;
- 3) Pengelolaan portfolio secara aktif untuk pengelolaan risiko kredit sesuai dengan *risk appetite* dari bank;
- 4) Mengadakan kerjasama dengan showroom kendaraan untuk menggencarkan pemasaran produk kendaraan bermotor melalui kegiatan ekspo;
- 5) Memberikan promo suku bunga KKB yang kompetitif sebagai langkah penetrasi pasar yang utamanya diprioritaskan bagi sasaran debitur tertentu seperti Aparatur Sipil Negara dan pegawai BUMN/BUMD/swasta.

**b. Sinyal Penurunan *Fed Funding Rate* (FFR)**

Mayoritas bank berpendapat bahwa penurunan suku bunga acuan The Fed dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Kondisi ini dapat mendorong kenaikan investasi, konsumsi, dan pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran bank tentang adanya kemungkinan bahwa penurunan suku bunga The Fed (*Fed Fund Rate/FFR*) akan tertahan yaitu paling cepat pada triwulan II-2024 hingga akhir tahun 2024 seiring dengan masih tingginya tensi geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan tekanan inflasi global.

Secara umum, potensi dampak positif dari penurunan FFR terhadap perekonomian Indonesia dapat terjadi melalui jalur transmisi perdagangan maupun pasar keuangan.

- 1) Dari jalur perdagangan, penurunan FFR akan memicu aktivitas ekonomi global yang lebih baik sehingga berpotensi meningkatkan permintaan terhadap ekspor Indonesia. Peningkatan ekspor Indonesia tentu akan mendorong surplus neraca perdagangan maupun perolehan cadangan devisa yang lebih tinggi dan secara lebih lanjut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

- 2) Dari jalur keuangan, penurunan FFR juga akan mendorong kembalinya aliran dana masuk ke emerging markets dan menjadi penopang penguatan pasar keuangan global, termasuk pasar keuangan Indonesia. Dengan demikian, harga aset keuangan domestik akan cenderung meningkat dan nilai tukar Rupiah terhadap USD berpotensi terapresiasi. Hal tersebut selanjutnya akan berimplikasi pada menurunnya biaya produksi domestik sehingga inflasi menjadi lebih terkendali (terutama dari imported inflation) dan kesehatan sektor keuangan lebih terjaga terutama bagi yang memiliki kewajiban dalam bentuk valas.

Sedangkan bagi perbankan Indonesia, penurunan FFR yang diikuti dengan penyesuaian BI Rate akan berdampak pada turunnya *cost of fund* bank sehingga nilai bunga pinjaman tidak terlalu besar. Di satu sisi, hal tersebut dapat mengakselerasi kredit dalam mendorong konsumsi dan investasi domestik sebagai katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, di sisi lain penurunan FFR juga dapat mengurangi pendapatan bunga karena suku bunga yang lebih rendah cenderung akan menekan margin keuntungan bersih bank (*Net Interest Margin/NIM*). Beberapa strategi bank untuk mengelola dampak penurunan FFR pada pendapatan bunga bersih dan NIM antara lain:

- 1) Meningkatkan *fee based income* dari produk perbankan;
- 2) Penguatan pada produk layanan digital untuk meningkatkan sumber pendanaan CASA.
- 3) Mendorong akselerasi kredit sementara menyesuaikan suku bunga terutama dari sisi DPK untuk optimalisasi pendapatan bunga bersih dan NIM;
- 4) Mengevaluasi dan melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko kredit dan memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lain selain bunga;
- 5) Meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas;
- 6) Mengelola risiko suku bunga dengan menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti swap suku bunga, untuk melindungi NIM dari fluktuasi suku bunga.

**c. Tantangan dalam Penyaluran Kredit/Pembiayaan ke Sektor Terkait Ekonomi Hijau**

Berdasarkan hasil survei, tantangan dan risiko perbankan yang perlu diwaspadai pada tahun 2024 yaitu ketidakpastian kondisi perekonomian global maupun domestik. Ketidakpastian perekonomian global di antaranya adalah suku bunga The Fed yang masih berada di level tinggi, konflik geopolitik yang sedang terjadi dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Selanjutnya

untuk ekonomi domestik perlu diwaspadai dinamika nasabah dan investor akibat ketidakpastian di tahun politik. Dalam menghadapi tantangan dan risiko tersebut, responden menyampaikan telah memiliki beberapa strategi seperti:

- 1) Diversifikasi sumber dan penggunaan dana;
- 2) Mendorong pertumbuhan kredit dan dana murah, dengan mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas digital;
- 3) Melakukan *stress test* untuk melihat kapabilitas dan kinerja keuangan debitur dalam menghadapi tekanan-tekanan.

Beberapa tantangan/kendala utama yang dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan ke sektor terkait ekonomi hijau antara lain:

- 1) **Kurangnya pemahaman dan kesadaran Bank** akan konsep ekonomi hijau dan transisi serta manfaatnya dalam jangka panjang serta masih terbatasnya permintaan atas pembiayaan hijau.
- 2) **Kesulitan mengukur dampak lingkungan dan sosial** karena mekanisme penilaian atas pembiayaan kepada debitur sesuai kerangka/kriteria Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang sangat komprehensif, sehingga membutuhkan kapabilitas yang sangat spesifik pada setiap sektor.
- 3) **Potensi tambahan biaya** dalam penentuan sektor pembiayaan hijau karena menggunakan pihak eksternal yang memiliki keahlian tertentu/sertifikasi untuk memenuhi verifikasi atas proyek hijau.
- 4) **Belum ada insentif yang cukup** dari pemerintah/regulator untuk mendukung untuk perkembangan ekonomi hijau baik bagi perbankan ataupun debitur.
- 5) **Ketidakjelasan definisi dan kategori** mengenai sektor atau proyek apa saja yang termasuk dalam kategori hijau atau transisi maupun eligibilitas debitur terhadap pemenuhan kategori sebagai TKBI, sehingga dapat menghambat bank dalam membuat keputusan pembiayaan.

Selanjutnya, bank telah memiliki beberapa strategi untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain:

- 1) Mengembangkan program pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas unit terkait dalam hal memahami produk, potensi bisnis, dan risiko sektor ekonomi hijau.

- 2) Melakukan langkah-langkah mitigasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pembiayaan yang dilakukan termasuk pembiayaan berkelanjutan dan transisi.
- 3) Menyediakan produk Keuangan Berkelanjutan yang spesifik untuk pembiayaan kepada proyek energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, proyek bangunan hijau dan pariwisata ramah lingkungan (wisata untuk memperbaiki keanekaragaman hayati, konservasi fauna, dan sumber daya alam lainnya).
- 4) Pengklasifikasian portofolio kredit/pembiayaan yang sudah ada dengan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan.

**d. Pemberian Kredit melalui Layanan Digital**

Berdasarkan hasil survei diperoleh bahwa jumlah bank pemberi fasilitas pemberian kredit melalui layanan digital masih relatif terbatas. Adapun tantangan/kendala utama yang dapat menyebabkan memburuknya kualitas kredit melalui layanan digital bank saat ini dipengaruhi oleh kombinasi berbagai potensi risiko yang dihasilkan dari ketegangan geopolitik yang masih terus berlanjut, kenaikan suku bunga acuan, serta tingginya gejolak inflasi menjadi hal krusial yang harus diwaspadai. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan perekonomian domestik dan berimbas pada kesulitan likuiditas dan profitabilitas pengusaha yang secara tidak langsung dapat meningkatkan potensi pemburukan risiko kredit.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi permasalahan dalam pemberian kredit melalui layanan digital antara lain:

- 1) Melakukan *monitoring* dan evaluasi serta perbaikan atas kendala yang ditemukan baik dari sisi kualitas kredit maupun sisi pengembangan teknologi informasi.
- 2) Meningkatkan pengamanan sistem dan membuat kebijakan kredit khusus, contohnya dengan menggunakan biometrik *face recognition*, *scoring*, dan *internal/external blacklist* secara *end to end* untuk mengurangi potensi gagal bayar.
- 3) Membatasi limit untuk setiap pengguna Paylater serta melakukan analisis untuk setiap pengajuan nasabah.
- 4) Menerapkan *autodebet* untuk pembayaran tagihan untuk menghindari memburuknya kualitas kredit. Pemblokiran fasilitas Paylater juga dilakukan jika terdapat tunggakan 1 hari atau lebih dan fasilitas baru.
- 5) Edukasi penggunaan layanan digital tidak hanya dalam pemberian kredit tapi edukasi terkait mudahnya menikmati layanan perbankan melalui kanal digital.

**e. Permasalahan Properti dan Real Estate di Beberapa Negara**

Terjadinya permasalahan sektor Properti dan Real Estate di beberapa negara menurut responden tidak berdampak signifikan baik langsung maupun tidak langsung bagi bank. Industri real estate dan properti di Indonesia pada tahun 2024 pun diyakini masih akan tumbuh positif seiring dengan permintaan yang terjaga di tengah perbaikan daya beli. Adanya perpanjangan kebijakan *Loan to Value (LTV)/Financing to Value (FTV)* sampai dengan 100% yang diberlakukan sampai akhir tahun 2024 juga berpotensi mendorong permintaan properti pada segmen menengah atas. Selain itu, berlangsungnya Pemilu 2024 yang lebih kondusif dengan ketidakpastian yang lebih pendek mendorong para pelaku usaha yang semula *wait and see*, untuk berinvestasi di sektor properti. Pembangunan IKN juga diperkirakan akan mendorong perluasan investasi di sektor properti di luar wilayah Jawa semakin meningkat. Selanjutnya, mayoritas bank responden meyakini bahwa Kredit Sektor Real Estate dan Properti masih akan tumbuh positif pada tahun 2024 dengan NPL yang terjaga. Adanya sinyal penurunan FFR yang akan diikuti oleh penyesuaian BI Rate diyakini akan berdampak positif dan mendorong permintaan kredit kepemilikan rumah. Hal ini mengingat sebagian besar pembeli rumah menggunakan KPR.

**f. Penjualan NPL**

Mayoritas bank responden belum pernah melakukan penjualan NPL. Namun demikian, terdapat beberapa bank yang menyatakan telah melakukan penjualan NPL dengan waktu mulai penjualan NPL yang beragam. Terdapat bank yang telah melakukan penjualan NPL sejak tahun 2015, namun demikian sebagian besar lainnya mulai melakukan penjualan NPL antara tahun 2018 hingga 2023.

Dalam menentukan nilai NPL yang akan dijual bank menerapkan *Time vs Recovery Rate* dengan melakukan *assessment* terhadap potensi, waktu dan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan *recovery* dari pembayaran debitur NPL serta eksekusi jaminan, lalu dibandingkan dengan nilai *recovery* yang di dapatkan dari penjualan NPL. Umumnya pembeli NPL antara lain adalah investor *distressed asset* baik berupa perusahaan atau perorangan dan dapat dari dalam maupun luar negeri, dan perusahaan/entitas yang bergerak di bisnis *trustee* atau *conculancy*.

Beberapa bank melakukan penjualan NPL melalui pasar sekunder. Namun demikian, ketika melakukan penjualan NPL di pasar sekunder, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bank seperti:

- 1) Keterbatasan informasi terkait harga rata-rata penjualan NPL di pasar, banyaknya penjualan jaminan yang terjadi saat ini sehingga membatasi harga penawaran dari Pembeli NPL, dan
- 2) Ketentuan hukum yang belum memadai, sehingga belum menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Belum adanya perlindungan hukum pada penjualan NPL di pasar sekunder dapat menimbulkan risiko bagi bank seperti adanya gugatan dari debitur maupun pihak ketiga lainnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi penjualan NPL, Bank harus melakukan kajian hukum terkait kelengkapan dokumentasi kredit dan memastikan terdapat klausul pengalihan tagihan kepada pihak ketiga di dalam perjanjian kredit dan adanya kondisi pengalihan dengan kondisi apa adanya. Apabila ada kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam kajian, maka bank kemudian memberikan disclosure kepada pembeli NPL. Selain risiko gugatan hukum, juga terdapat risiko di mana penjualan kredit bermasalah tidak sesuai dengan harga yang diharapkan sehingga Bank membukukan loss yang besar untuk pembukuan Bank. Oleh karena itu, untuk memitigasi risiko tersebut bank melakukan eksplorasi atas beberapa alternatif calon pembeli dengan penawaran harga yang lebih baik.

Meskipun terdapat beberapa tantangan dan risiko dalam penjualan NPL di pasar sekunder, namun demikian mayoritas bank berpendapat bahwa penjualan di pasar sekunder memiliki prospek yang baik ke depannya dan dapat menjadi salah satu alternatif bagi bank dalam melepas aset bermasalah. Selain itu, proses yang lebih cepat dalam penjualan NPL di pasar sekunder juga lebih menguntungkan bagi bank, karena jika ditangani oleh bank sendiri akan memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Selanjutnya, responden bank memberi masukan perlunya disusun kerangka hukum/ regulasi oleh pemerintah/regulator guna mendukung ekosistem penjualan NPL di pasar sekunder berjalan dengan baik.

